

ANALISIS PENGARUH POPULASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, TPAK DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BARLINGMASCAKEB 2013-2019

Bustam Anggun Pamiati¹, Neni Woyanti²

¹Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang

²Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang

e-mail: bustamanggun@gmail.com, neniwoyanti346@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) klasifikasi pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kawasan Barlingmascakeb berdasarkan *Tipologi Klassen* tahun 2019; 2) ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Kawasan Barlingmascakeb; 3) pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019. Penelitian ini menggunakan Tipologi Klassen, *Indeks Williamson*, dan Analisis Regresi Data Panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dengan waktu penelitian 2013-2019. Hasil analisis *Tipologi Klassen* menunjukkan bahwa Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Kebumen berada pada kelompok daerah berkembang pesat, sedangkan Cilacap berada pada kelompok daerah maju tapi tertekan. Analisis *Indeks Williamson* menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tergolong rendah dan cenderung menurun. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis regresi ditemukan bahwa secara simultan Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019.

Kata kunci: Barlingmascakeb, *fixed effect model*, ketimpangan pembangunan, *tipologi klassen*

Abstract

This research aims to analyzing : 1) classification of district economic growth in the region Barlingmascakeb based on Klassen Typology in 2019; 2) development inequality among district in the region Barlingmascakeb; 3) influence of population, economic growth, LFPR, and HDI on development inequality in the region Barlingmascakeb in 2013-2019. This research uses Klassen Typology, Williamson Index, and Panel Data Regression Analysis by method Fixed Effect Model (FEM) with the research time of 2013-2019. The result of Klassen Typology analysis show that Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, and Kebumen is at a group fast growing, while Cilacap is in the forward but depressed group. Williamson Index analysis shows that development inequality in Barlingmascakeb is low and tends to decrease. Furthermore, based on the result of regression analysis it was found that simultaneously population, economic growth, LFPR, and HDI have a negative and significant effect on Development Inequality in the region Barlingmascakeb in 2013-2019.

Keywords : Barlingmascakeb, *development inequality*, *fixed effect model*, *typology klassen*

1. Pendahuluan

Arsyad (2014) mendefinisikan Pembangunan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tidak hanya mencakup satu aspek saja (ekonomi maupun sosial), namun mencakup berbagai aspek yang ada didalam masyarakat. Mauliddiyah (2014), menjelaskan bahwa pembangunan mencakup perubahan struktur sosial, perubahan sikap hidup masyarakat, dan mencakup perubahan dalam kelembagaan atau institusi nasional. Pembangunan juga mencakup perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita suatu daerah, sedangkan laju pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan nilai PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) dalam suatu daerah dan nilai PDB dalam suatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat telah memberikan hak dan wewenang tentang otonomi daerah, yang didalamnya pemerintah daerah dilimpahkan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, dan diberi

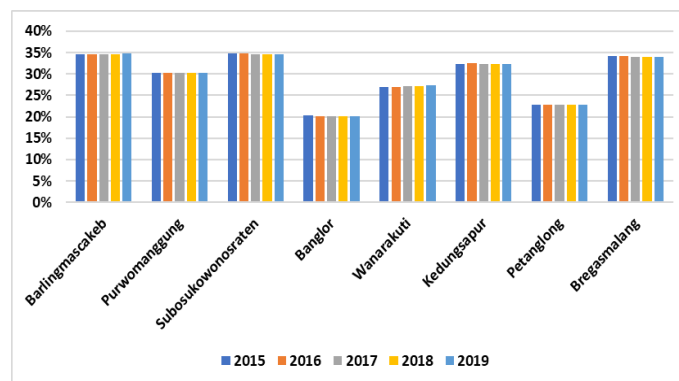
kesempatan untuk mengembangkan perekonomian daerah. Namun dalam keberjalanannya tidak semua daerah mengalami proses pembangunan ekonomi yang sama.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, pulau ini terdiri atas 6 provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, dan DKI Jakarta. Pulau Jawa tidak terlepas dari adanya ketimpangan pembangunan. Ketimpangan yang terjadi ini disebabkan karena ekonomi Indonesia yang memang terkonsentrasi di Pulau Jawa, salah satunya Provinsi Jawa Tengah.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah merumuskan RPJMD Tahun 2018-2023 tentang arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi menetapkan 8 (delapan) wilayah pengembangan untuk mencapai peningkatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota tahun 2018-2023. Tujuan dibentuknya kawasan ini agar setiap daerah dapat saling bekerjasama dan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pemerataan pembangunan nasional. Delapan Kawasan Strategis atau Kawasan Kerjasama tersebut yaitu :

1. Kawasan Kedungsapur (Kendal, Kota Semarang, Demak, Semarang dan Kota Salatiga, Grobogan)
2. Kawasan Wanarakuti (Pati, Kudus, dan Jepara)
3. Kawasan Subosukowonosraten (Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten)
4. Kawasan Bregasmalang (Brebes, Kota Tegal, Tegal, Pemalang)
5. Kawasan Petanglong (Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan)
6. Kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen)
7. Kawasan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung)
8. Kawasan Banglor (Rembang, dan Blora)

Ihsan dan Keban (2019) mendefinisikan disparitas atau ketimpangan wilayah sebagai suatu fenomena ketidakmerataan pembangunan masyarakat di dalamnya, yang kemudian dapat memicu terjadinya ketimpangan pembangunan. Pada saat terjadi awal proses pembangunan ekonomi di suatu daerah, hal ini memicu timbulnya ketimpangan yang terjadi di antar daerah tersebut. Pada awalnya penyebab terjadinya ketimpangan adalah bedanya sumber daya alam dan struktur letak geografis antar daerah, sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya perbedaan aktivitas antar wilayah dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan, kemudian dalam digolongkan dua jenis daerah, yaitu daerah berkembang (*developed region*) dan daerah terbelakang (*undeveloped region*). Lessman (2012) menemukan hasil bahwa suatu negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi cenderung memiliki ketimpangan pembangunan yang rendah, ini artinya semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara maka berindikasi juga pada semakin meratanya kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut.

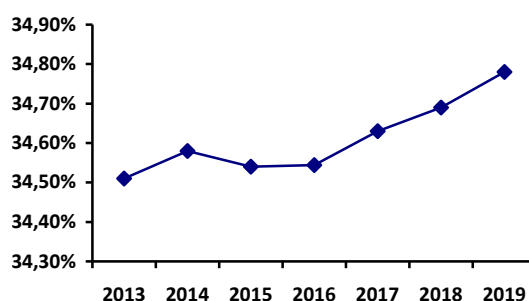


Gambar 1.1

Ketimpangan Pembangunan Kawasan Strategis Jawa Tengah, 2015-2019 (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan indeks Williamson menghasilkan nilai ketimpangan pembangunan rata-rata 0,34 atau 34% di setiap kawasan strategis Jawa Tengah. Dari 8 kawasan pengembangan, Kawasan Barlingmascakeb merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ketimpangan tertinggi pada tahun 2019 dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2015-2019. Hal ini disebabkan oleh proporsi nilai PDRB Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki selisih sangat besar, bahkan pada tahun 2019 nilai PDRB perkapita Banjarnegara hanya sekitar 15,1% dari PDRB perkapita total Kabupaten Cilacap.

Wilayah Barlingmascakeb merupakan wilayah pengembangan eks karesidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Sutrisno (2012) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa Kawasan Barlingmascakeb merupakan salah satu dari tiga Kawasan strategi yang memiliki rata-rata *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) tertinggi di Jawa Tengah dan memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dibawah kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi). Hal ini tak lain diakibatkan tingginya kontribusi PDRB Kabupaten Cilacap setiap tahunnya.



Gambar 1.2
Ketimpangan Pembangunan Kawasan Barlingmascakeb, 2013-2019 (Persen)

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada periode 2013-2019 tingkat ketimpangan pembangunan hasil perhitungan *indeks williamson* menunjukkan nilai yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2019 angka ketimpangan pembangunan mencapai 0,347 atau 34,7%. Pada kurun tahun 2015-2019 terjadi perbedaan laju PDRB yang sangat signifikan pada ke-lima Kabupaten pembentuk kawasan ini, Kabupaten Cilacap memiliki nilai PDRB yang sangat tinggi, hal ini sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Banjarnegara yang memiliki nilai PDRB jauh dibawah rata-rata PDRB Kawasan Barlingmascakeb. Sedangkan jika dilihat dari aspek sosial, seperti jumlah penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ternyata juga memperlihatkan perbedaan yang signifikan di antar Kabupaten kurun tahun 2015-2019. Hal ini lah yang kemudian mengindikasikan terjadinya Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten di Kawasan Barlingmascakeb.

Darzal (2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi angka PDRB yang diterima suatu daerah dapat mencerminkan pembangunan daerah tersebut juga semakin baik. Pertumbuhan Ekonomi dapat mempersentasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat setiap tahunnya. Nilai pendapatan masyarakat dapat dihitung melalui pengolahan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output berupa barang maupun jasa, sehingga masyarakat atau pemilik faktor produksi akan mendapatkan keuntungan melalui balas jasa (Agusalim, 2016).

Menurut Masfufah (2013), untuk melihat perbedaan pembangunan antar daerah tidak hanya sebatas analisis dengan memperbandingkan data PDRB, karena kurang dapat memberikan presentasi kemampuan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Khoir dan Pujiati (2016), menyebutkan bahwa jumlah penduduk atau populasi menjadi salah satu

penyebab terjadinya ketimpangan dalam suatu daerah, hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu daerah terjadi ketidakmerataan persebaran jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah yang tidak diiringi dengan penambahan kesempatan kerja, akan menimbulkan permasalahan semakin tingginya angka pengangguran.

Darzal (2016), naiknya Partisipasi Angkatan kerja atau produktivitas dapat memicu bertambahnya output, dalam hal ini output diartikan sebagai pendapatan perkapita yang diterima oleh Angkatan kerja tersebut. Semakin besar pendapatan atau upah yang didapatkan maka semakin besar kemampuan masyarakat tersebut untuk melakukan konsumsi, dan hal inilah yang akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin merata.

Sjafrizal (dalam Khoir dan Pujiati, 2016) menyebutkan bahwa apabila terjadi perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang tidak diimbangi dengan perhatian pemerintah yang kemudian berakibat pada terhambatnya arus migrasi, ini akan berdampak pada melonjaknya angka tenaga kerja disuatu daerah yang tidak dapat diserap oleh daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya hal ini akan mendorong terjadinya disparitas antar daerah karena tingginya Angkatan tenaga kerja disuatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain, kemudian daerah yang kekurangan Angkatan Kerja akan lambat dalam melakukan kegiatan perekonomian dan menghambat proses pembangunan.

Arsyad (2014) memberikan pendapat bahwa konsep pendapatan atau sisi ekonomi mempunyai kekurangan, yaitu konsep ini kurang memperhatikan adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki daerah tertentu, seperti usia penduduk, jumlah penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, maupun kondisi sosial-budaya), kemudian indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan suatu daerah adalah tingkat IPM, karena nilai IPM merupakan gabungan dari aspek ekonomi dan sosial. Dan IPM merupakan indikator yang mengukur mengenai taraf hidup masyarakat.

Kajian mengenai ketimpangan sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan ketimpangan merupakan salah satu tolak ukur dalam proses pembangunan suatu daerah. Tingginya angka ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb yang diukur melalui perhitungan Indeks Williamson dan cenderung mengalami peningkatan pada periode 2013-2019, bahkan merupakan Kawasan strategis yang memiliki nilai ketimpangan tertinggi di Jawa Tengah dibandingkan dengan 7 kawasan strategis lainnya, serta telah berdampak pada menurunnya tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut sangat perlu dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2013-2019".

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan ekonomi kabupaten yang tergabung pada Kawasan Barlingmascakeb berdasarkan *tipologi klassen* tahun 2019; menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah yang tergabung dalam Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019; dan menganalisis pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah yang tergabung dalam Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari publikasi Jurnal, BPS Jawa Tengah dan Bappeda Jawa Tengah. Beberapa alat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, diantaranya, yaitu : *Indeks Williamson* digunakan untuk mengukur besaran ketimpangan, dan *Analisis Tipologi Klassen* untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb menggunakan analisis regresi dengan data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menggunakan software Eviews 10.

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakan untuk melihat pola pembangunan ekonomi di setiap kabupaten penyangga Kawasan Barlingmascakeb. Pada penelitian ini, tiap kabupaten akan diklasifikasikan menjadi empat golongan atau daerah. Indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan tiap daerah ini yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB kabupaten. Terdapat 4 daerah atau golongan:

- Kuadran I : Daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*).
- Kuadran II : Daerah berkembang cepat (*low growth but high income*).
- Kuadran III : Daerah maju tapi tertekan (*high growth but low income*).
- Kuadran IV : Daerah tertinggal (*low growth and low income*).

Tabel 2.1
Tipologi Klassen

| $\begin{matrix} y \\ r \end{matrix}$ | $y_i > y$ | $y_i < y$ |
|--------------------------------------|---|---|
| $r_i > r$ | Kuadran 1 Daerah maju dan cepat tumbuh | Kuadran II Daerah berkembang cepat |
| $r_i < r$ | Kuadran III Daerah maju tapi tertekan | Kuadran IV Daerah relatif tertinggal |

Sumber : Sjafrizal, 2008

Keterangan:

- r_i : Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten i
- y_i : PDRB perkapita kabupaten i
- r : Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah
- y : PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah

Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besaran ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dalam suatu daerah dengan membandingkan nilai PDRB antar daerah tersebut. Berikut rumus *Indeks Williamson* yang dikutip dari buku Sjafrizal (2008) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \times \sum f_i / n}}{y} \quad (2.1)$$

Keterangan:

- IW : Indeks Williamson
- y_i : PDRB di kabupaten i
- y : PDRB Provinsi Jawa Tengah
- f_i : Jumlah penduduk kabupaten i
- n : Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

Sjafrizal (2008) dalam penelitiannya menetapkan 3 kriteria hasil perhitungan Indeks Williamson, yaitu tingkat ketimpangan rendah, sedang, atau tinggi. Berikut rentang angka kriteria ketimpangan :

- $IW < 0,35$ menunjukkan tingkat ketimpangan rendah
- $IW 0,35 - 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan sedang
- $IW > 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi

Standarisasi Data

Dalam penelitian ini perlu dilakukan proses standarisasi data dengan cara transformasi data asli sebelum diregresi atau dianalisis lebih lanjut, hal ini dikarenakan variabel yang digunakan memiliki satuan yang berbeda. Penggunaan hasil regresi yang didasarkan pada suatu unit pengukuran tertentu, dapat menggunakan unit pengukuran yang lain, dengan menentukan unit pengukuran yang sesuai. Keuntungan menggunakan standarisasi data adalah data standarisasi menyatakan semua variabel dengan satuan yang sama, dan semua variabel terstandarisasi memiliki nilai rerata 0 dan varians 1, dengan begitu model akan terhindar dari permasalahan normalitas (Gujarati dan Porter, 2015).

Transformasi data yang peneliti gunakan adalah *Logarithm* atau transformasi logaritma, yaitu dengan merubah variabel ke bentuk log terlebih dahulu sebelum melakukan regresi. Dalam hal ini peneliti hanya melakukan transformasi logaritma pada variabel Populasi (POP), hal ini dikarenakan hanya variabel Populasi yang memiliki satuan berbeda dengan variabel Ketipampangan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, maupun IPM. Alasan lain peneliti memilih transformasi ke bentuk logaritma adalah penggunaan log natural mampu membuat data yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi atau mendekati distribusi normal.

Analisis Regresi Data Panel

Data Panel merupakan gabungan dari data *time series* dengan periode 2013-2019 dan data *cross-section* yang meliputi 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb periode 2013 hingga 2019. Model prediksi dalam penelitian ini adalah:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln POP_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it} \quad (2.2)$$

Keterangan:

| | |
|---|---|
| KP | : Ketimpangan Pembangunan (Persen) |
| β_0 | : Konstanta |
| $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$ | : Koefisien |
| POP | : Jumlah Penduduk (Jiwa) |
| PE | : Pertumbuhan Ekonomi (Persen) |
| TPAK | : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) |
| IPM | : Indeks Pembangunan Manusia (Persen) |
| e | : Error |

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis *Tipologi Klassen*

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan ekonomi kabupaten yang tergabung pada Kawasan Barlingmascakeb tahun 2019. *Tipologi Klassen* adalah analisis yang digunakan untuk melihat pola pembangunan ekonomi di setiap kabupaten penyangga Kawasan Barlingmascakeb tersebut. Hasil analisis dengan metode *tipologi klassen* dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Hasil Analisis *Tipologi Klassen* Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2019

| r \ y | $y > y$ | $y_i < y$ |
|-----------|--|--|
| $r_i > r$ | Kuadran I Daerah maju dan cepat tumbuh - | Kuadran II Daerah berkembang cepat <ul style="list-style-type: none"> • Banjarnegara • Purbalingga • Banyumas • Kebumen |
| $r_i < r$ | Kuadran III Daerah maju tapi tertekan <ul style="list-style-type: none"> • Cilacap | Kuadran IV Daerah relatif terbelakang - |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2020, diolah.

Keterangan:

r_i : Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten i

y_i : PDRB perkapita kabupaten i

r : Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah

y : PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB antar kabupaten yang tergabung dalam Kawasan Barlingmascakeb tahun 2019. Dari hasil analisis menggunakan *Tipologi Klassen*, Kawasan Barlingmascakeb dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Kuadran II : Daerah Berkembang cepat (*low growth but high income*)

Klasifikasi kuadran II ditempati oleh 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan ke empat kabupaten tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah, namun memiliki nilai Pendapatan Perkapita lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.

2. Kuadran III : Daerah Maju tapi Tertekan (*high growth but low income*)

Karakteristik yang dimiliki daerah dalam kuadran III adalah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pendapatan perkapita kabupaten lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang termasuk dalam karakteristik tersebut adalah Kabupaten Cilacap.

Pada Klasifikasi pertumbuhan ekonomi kabupaten yang tergabung pada Kawasan Barlingmascakeb tahun 2019 tidak didapatkan Kabupaten yang tergolong kedalam kuadran I (daerah maju) dan kuadran IV (daerah tertinggal), hal ini dapat mengindikasikan bahwa menurut kriteria analisis *Tipology Klassen* Sjafrizal (2008) Kawasan Barlingmascakeb merupakan wilayah yang memiliki daerah yang cukup baik. Meskipun begitu Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi kebijakan yang tepat agar kabupaten yang tergolong kedalam kuadran II nantinya dapat berkembang dan maju menjadi daerah yang maju dan cepat tumbuh, begitu juga dengan kabupaten yang menempati kuadran III dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih baik lagi.

Analisis Indeks Williamson

Pada tujuan kedua, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah yang tergabung dalam Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019. Besarnya ketimpangan pembangunan dalam penelitian ini menggunakan

perhitungan *Indeks Williamson*. Apabila hasil perhitungan *Indeks Williamson* mendekati diperoleh angka kurang dari 0,35 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di daerah tersebut rendah. Apabila angka *Indeks Williamson* berkisar antara 0,35 - 0,5 maka tingkat ketimpangan pembangunan masuk dalam kategori sedang. Dan apabila hasil perhitungan *Indeks Williamson* lebih dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi pada daerah tersebut tinggi (Sjafrizal, 2008).

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Ketimpangan Pembangunan
Menggunakan *Indeks Williamson*, Tahun 2013-2019

| Tahun | Kabupaten | | | | | Kriteria |
|-------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | Banjar-negara | Purba-lingga | Banyumas | Cilacap | Kebumen | |
| 2013 | 0,161075 | 0,159778 | 0,211296 | 0,199442 | 0,184364 | Rendah |
| 2014 | 0,161005 | 0,160011 | 0,211441 | 0,199794 | 0,183968 | Rendah |
| 2015 | 0,160922 | 0,160237 | 0,211582 | 0,199472 | 0,183562 | Rendah |
| 2016 | 0,160833 | 0,160479 | 0,2117 | 0,199295 | 0,183195 | Rendah |
| 2017 | 0,160748 | 0,1607 | 0,21179 | 0,199701 | 0,182821 | Rendah |
| 2018 | 0,16066 | 0,160917 | 0,211871 | 0,199993 | 0,18243 | Rendah |
| 2019 | 0,160561 | 0,167011 | 0,211972 | 0,200457 | 0,182046 | Rendah |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2020, diolah.

Pada Tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa angka ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Kawasan Barlingmascakep periode 2013-2019 dengan menggunakan perhitungan *Indeks Williamson* menghasilkan output ketimpangan rendah pada setiap kabupaten yang tergabung di Kawasan Barlingmascakeb.

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki nilai ketimpangan pembangunan tertinggi di Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten ini memiliki nilai rata-rata ketimpangan pembangunan 0,21 pada setiap tahunnya dalam periode 2013-2019. Tingginya angka ketimpangan di Kabupaten Banyumas disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk di kabupaten ini pada periode penelitian, meskipun angka IPM pada Kabupaten Banyumas cukup tinggi namun ternyata hal ini justru berbanding terbalik dengan nilai TPAK di kabupaten ini, hal inilah yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Banyumas, karena meskipun angka IPM tinggi, namun untuk angka partisipasi tenaga kerja atau TPAK di kabupaten ini masih tergolong rendah, yang menyebabkan angka penyerapan tenaga kerja juga rendah dibandingkan kabupaten di Kawasan Barlingmascakeb lainnya.

Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang memiliki nilai ketimpangan pembangunan terendah di Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi unggulan di bidang pertanian yang didukung oleh ketersediaan lahan yang subur dan cocok untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian seperti padi, jagung, kedelai, kentang, dll. Meskipun angka IPM di Kabupaten ini termasuk yang paling rendah, namun angka TPAK Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi dan hal ini dipicu oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yang mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Analisis Regresi Data Panel

Setelah dilakukan uji model terbaik pada pembahasan sebelumnya, model regresi panel yang paling baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM), dan hasil deteksi asumsi klasik menunjukkan bahwa data BLUE (*Best, Linier, Unbias, Estimator*) atau terbebas dari gejala masalah normalitas, multikolinearitas, Autokorelasi, maupun heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah hasil penelitian sejalan atau bertolak belakang dengan teori yang ada. Hasil estimasi data panel menggunakan FEM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

| Variabel | <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) | |
|----------------|---------------------------------|----------|
| | Koefisien | P-value |
| C | -0.794093 | 0.0000** |
| LnPOP | 0.073305 | 0.0000** |
| PE | -0.000109 | 0.1395 |
| TPAK | -5.161540 | 0.8383 |
| IPM | -0.000729 | 0.0000** |
| R ² | 0.999844 | |
| Uji-F | 0.000000 | |
| Uji Chow | 0.0000 | |
| Uji Haussman | 0.0000 | |

Sumber : BPS Jawa Tengah 2020, diolah Ket: **Signifikan pada alpha 5 persen

Berdasarkan output regresi metode *Fixed Effect Model* (FEM) diatas dapat dituliskan model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{KP} = -0.794093 + 0.073305 \ln(\text{POP}) - 0.000109 \text{ PE} - 5.161540 \text{ TPAK} - 0.000729 \text{ IPM} + e \quad (3.1)$$

Dimana :

- KP : Ketimpangan Pembangunan (Persen)
- POP : Jumlah Penduduk (Jiwa)
- PE : Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
- TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
- e : Error

Output regresi mendapatkan hasil bahwa nilai R-Squared (R²) sebesar 0.999844, hal ini menunjukkan bahwa Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019 mampu dijelaskan oleh empat variabel independen didalam model, yaitu Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM sebesar 99,98% sedangkan 0,02% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Variabel Populasi setelah dilakukan regresi menghasilkan output yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan (0.0000 < 0.05) terhadap Ketimpangan Pembangunan yang terjadi di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019. Besarnya pengaruh yang terjadi antar keduanya sebesar 0.073305, yang mengartikan bahwa apabila populasi atau jumlah penduduk di Kawasan Barlingmascakeb mengalami peningkatan 1%, maka keadaan ini juga memicu naiknya angka ketimpangan sebesar 0,07%. Salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kawasan Barlingmascakeb adalah Kabupaten Cilacap yang terkenal sebagai Kota Industri yang memiliki 7 Industri terbesar, hal ini lah yang memacu tingginya arus migrasi dengan tujuan mencari pekerjaan di Industri tersebut, kemudian berdampak pada tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia membuat distribusi pendapatan semakin tidak merata dan terjadilah ketimpangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2018) yang mengemukakan bahwa Ketimpangan Pembangunan yang terjadi di desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dikarenakan terus naiknya laju pertumbuhan jumlah penduduk, yang membuat penyebaran penduduk menjadi tidak merata kemudian memicu munculnya permasalahan peningkatan angka ketimpangan di desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan (0.1395 > 0.05) antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019. Besarnya pengaruh adalah

sebesar -0.000109, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% mampu menurunkan angka Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Barlingmascakeb sebesar 0.0001%. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusalm (2016) yang juga mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan berpengaruh negatif. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barlingmascakeb juga memicu tingginya kapasitas produksi, sehingga output dan pendapatan perkapita juga ikut semakin meningkat, selanjutnya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kawasan Barlingmascakeb semakin mengecil atau pembangunan semakin merata. Meskipun begitu variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb, ini disebabkan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kawasan ini sebagian besar disebabkan oleh permasalahan sosial seperti jumlah penduduk.

Berdasarkan output regresi didapatkan hasil bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan yang terjadi di Kawasan Barlingmascakeb, hal ini dapat dilihat pada output regresi yang menunjukkan bahwa nilai prob TPAK $0.8383 > 0.05$, sedangkan untuk nilai koefisien regresi variabel TPAK menunjukkan arah negatif dengan nilai -5.161540 , yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan TPAK sebesar 1% mampu menurunkan angka Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Barlingmascakeb sebesar 5,16%. Meskipun hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan teori daya tarik tenaga kerja, namun ternyata berbeda dengan hasil penelitian Khoir dan Pujianti (2016) yang justru mendapatkan hasil regresi yang menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara TPAK dengan Ketimpangan Pembangunan, namun terdapat hubungan positif antar keduanya. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sjafrizal, yang menyebutkan bahwa adanya migrasi yang kurang lancar akan berdampak pada semakin tingginya tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sangat sulit untuk mendorong proses pembangunan.

Dan berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap alpha 5% ($0.0000 > 0.05$) dengan koefisien -0.000729 yang artinya berhubungan negatif terhadap ketimpangan di Kawasan Barlingmascakeb. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% IPM, maka akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0,0007%. Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Barlingmascakeb ternyata justru juga akan mengecilkan besarnya ketimpangan yang terjadi. Hal ini juga mengartikan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya investasi dalam hal sumber daya manusia daerah tersebut juga tinggi, sehingga ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tersebut juga akan berkurang. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Rama, dkk (2012) yang menyebutkan terdapat hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan IPM di Jawa Timur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan.

Dari hasil regresi tersebut pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019 diperoleh Prob (F-Statistik) negatif sebesar 0.000000, yang artinya nilai prob F-statistik lebih kecil dari nilai alpha ($0.000000 < 0.05$), sehingga H_1 diterima dan tolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019.

4. Simpulan dan Saran Kesimpulan

Berdasarkan klasifikasi pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis *Tipologi Klassen*, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Kawasan Barlingmascakeb terbagi menjadi 2 (dua) daerah, yaitu daerah maju tapi tertekan, dan daerah berkembang cepat. Kabupaten Cilacap

tergolong kedalam kriteria daerah yang maju tapi tertekan. Dan yang termasuk kedalam kriteria daerah berkembang pesat adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen.

Kemudian berdasarkan *Indeks Williamson* didapatkan hasil bahwa kurun tahun 2013-2019 nilai ketimpangan pembangunan semua kabupaten di Kawasan Barlingmascakeb berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan, dengan angka ketimpangan pembangunan yang tergolong rendah, yaitu dengan rata-rata angka ketimpangan 0,18 atau sekitar 18% setiap tahunnya. Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki angka ketimpangan pembangunan tertinggi. Sedangkan yang memiliki tingkat ketimpangan terendah di Kawasan Barlingmascakeb adalah Kabupaten Banjarnegara.

Ketimpangan Pembangunan yang terjadi di Kawasan Barlingmascakeb dipengaruhi oleh beberapa faktor atau indikator pembangunan. Variabel Populasi memiliki pengaruh positif dan signifikan, artinya apabila populasi naik maka ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb juga akan mengalami peningkatan. Kemudian Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan, hal ini mengartikan bahwa setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi, akan menurunkan Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb. Sedangkan untuk variabel TPAK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, peningkatan TPAK di Kawasan Barlingmascakeb akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan. Kemudian variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, setiap peningkatan nilai IPM, maka akan berdampak pada penurunan angka ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb. Dan secara bersama-sama variabel Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk pemerintah maupun peneliti selanjutnya. Beberapa saran untuk pemerintah sebagai berikut : 1) Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb adalah tingginya jumlah penduduk. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus dapat mengontrol arus migrasi dan angka fertilitas dengan lebih mengkampanyekan Program GenRe (Generasi Berencana) untuk pasangan muda. 2) Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb mampu berkurang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap daerahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya atau kebijakan pemerintah yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya : melakukan alokasi investasi, khususnya di sektor industri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada penurunan Ketimpangan Pembangunan. 3) Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus pada kualitas SDM untuk meningkatkan nilai IPM di Kawasan Barlingmascakeb, seperti memperbesar proporsi anggaran pemerintah di bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai bentuk *Human Capital Investment*. 4) Semakin tinggi TPAK, semakin banyak output produksi yang dihasilkan dan kemudian dapat menurunkan Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb. Sehingga perlu adanya program Pemerintah Daerah terkait dengan peningkatan skill atau keahlian untuk calon tenaga kerja. Dan saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti topik yang sama dengan periode tahun yang lebih panjang dan menggunakan variabel lain untuk selanjutnya melakukan perbandingan.

Daftar Pustaka

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. *Kinerja*, Vol. 20 No. 1, 53-68.
- Arsyad, L. (2014). *Ekonomi Pembangunan Lanjutan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Bappeda. (2018). *Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah*. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2019*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2019*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2019*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 menurut Provinsi Tahun 2015-2019*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2019*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Darzal. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No. 2, 131-142.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. (2015). *Dasar Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihsan, Y.T. dan Y.T. Keban. (2019). Disparitas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3 No. 1, 75-87.
- Khoir, A.D dan A. Pujiati. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 5 No. 1, 101-108.
- Lessmann, C. (2012). Regional Inequality and Decentralization : an Empirical Analysis. *Environment and Planning*, Vol. 44, 1363-1388.
- Masfufah. (2013). Konvergensi dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Disparitas Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Sosiohumaniora*, Vol. 15 No. 2, 194-202.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. *Ihtiyath*, Vol. 2 No. 2, 255-270.
- Mauliddiyah, A. (2014). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012). *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Vol. 6 No.2, 156-163.
- Rama, dkk. (2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4, 110-119.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Bodouse Media.
- Sutrisno, A. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No.1, 43-49.